

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai (a) kurikulum kulliyatul muallimin al-islamiyah Gontor yang didalamnya membahas mengenai struktur, beban belajar, kalender pendidikan; (b) manajemen kurikulum yang di dalamnya membahas mengenai pengertian manajemen kurikulum; prinsip dan fungsi manajemen kurikulum; perencanaan kurikulum; pelaksanaan kurikulum; evaluasi kurikulum; (c) mutu madrasah; (d) pondok pesantren; (e) penelitian terdahulu; dan (f) paradigma penelitian.

A. Kurikulum Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor

Nama Gontor sulit dipisahkan dari khazanah dunia pendidikan Islam di Indonesia. Hal tersebut, terutama dikarenakan oleh kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa di desa yang terletak di sebelah selatan kota Ponorogo, Jawa Timur, terdapat sebuah lembaga yang masyhur. Oleh para pendirinya, lembaga itu disebut Pondok Darussalam. Masyarakat luas lebih mengenalnya sebagai Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). Pondok Gontor sejak lama dikenal dengan kisah para alumninya dan kurikulumnya yang modern, dari masa penjajahan hingga saat ini ia konsisten dengan sistemnya. Sejak tahun 1926, pondok di Bumi Warok Ponorogo ini bertahan dengan sistem pendidikan integratifnya yang memadukan kurikulum intra, ekstra dan kokurikuler. Itulah Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah (sekolah persemaian guru-guru Islam). Kini sistem Gontor dengan Mualliminnya tersebut menjadi

tren baru pendidikan nasional. Sebutan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) sebuah institusi pendidikan setingkat dengan SLTP dan SLTA, yang terintegrasi dalam kehidupan pesantren.¹

Kurikulum yang diterapkan oleh K.H. Imam Zarkasyi di Gontor pada tahap perintisannya adalah kurikulum Normal Islam yang didirikan Prof. Mahmud Yunus di Padang Sumatera Barat.² Hal itu dikarenakan karena ia memang telah mendapat pengakuan (ijazah) dari gurunya bahwa ia dianggap mampu mendirikan dan mengajar sekolah serupa atau sederajat dengan Normal Islam. Karena ide dan konsep KMI ini berasal dari K.H. Imam Zarkasyi, maka disepakati bahwa yang akan memimpin atau menjadi direktornya adalah K.H. Imam Zarkasyi. Maka dapat kita katakan bahwa K.H. Imam Zarkasyi adalah pimpinan pesantren, “*desainer*” KMI, direktur dan sekaligus guru. Ide dan konsep KMI yang digagas oleh K.H. Imam Zarkasyi berawal dari keprihatinan beliau akan marjinalisasi dalam pendidikan pesantren akibat penjajahan Belanda. Menurutnya marjinalisasi tersebut berakibat pada timbulnya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Secara akademis, sebenarnya ada dua jenjang pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Gontor, yaitu jenjang pendidikan menengah dengan nama Kulliyatul-Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) dan jenjang perguruan tinggi dengan nama Institut Studi Islam Darussalam (ISID),

¹TIM Penulis, K.H. Imam Zarkasyi, Dari Gontor Merintis Pesantren Modern (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2016), hal. xiii

²TIM Penulis, K.H. Imam Zarkasyi, Dari Gontor Merintis Pesantren Modern (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2016), hal. 72

sekarang disebut Universitas Darussalam (UNIDA). Dalam pembahasan ini, penulis hanya menfokuskan pembahasan tentang KMI.

KMI Gontor merupakan lembaga yang menggeluti jangka pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor.³ Secara yuridis, kurikulum KMI didasarkan kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara aturan dan peraturan yang menjadi dasar penyusunan dan pengembangan kurikulum adalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Di jenjang pendidikan menengah selain ada KMI, juga ada pengasuhan santri yang membidangi kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler. Pengembangan sistem pengajaran KMI berlangsung independen, kurikulum disusun secara mandiri sesuai dengan program pondok. Misalnya, materi keterampilan, kesenian, dan olahraga tidak dimasukkan ke dalam kurikulum, tetapi menjadi aktivitas ekstrakurikuler agar santri lebih bebas memilih dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat.

Program pendidikan KMI yang dijalankan di pesantren ini berdasarkan kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 terdiri dari kelompok bidang studi keislaman, Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan Umum.

³ Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor, Vol. 63 (Ponorogo: Darussalam Press, 1431 H), hal. 1

Dengan masa belajar 6 tahun bagi tamatan SD/MI, 4 tahun bagi tamatan SMP/MTs. Ada beberapa pesantren alumni Gontor yang menamakan program ini dengan sebutan Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (TMI). Pembelajaran kurikulum KMI Gontor membuahkan hasil sangat memuaskan. Pondok Gontor telah melahirkan ratusan ribu alumni yang pintar dan "tahan banting" yang tersebar dan berkiprah di berbagai lini kehidupan dan masyarakat.

Panca jiwa Gontor, yakni keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah, dan berpikiran bebas, merupakan lima hal yang secara konsisten diajarkan dalam sistem pendidikan dan kurikulumnya. Secara filosofis apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami oleh siswa (santri) sehari-hari dalam kehidupan di pesantren adalah unsur yang mendidik. Selanjutnya nilai-nilai dan falsafah pendidikan tersebut diwujudkan dalam rumusan-rumusan visi KMI sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah thalabul 'ilmi, dan menjadi pusat pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pesantren. Prinsip-prinsip dasar seperti itulah yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum KMI. Pada aspek teoritis, kurikulum KMI dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan tradisi dan budaya pesantren yang diwariskan oleh kyai secara berkesinambungan. Karakteristik kurikulum KMI ini dikembangkan pada kompetensi inti yang merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang. Kurikulum ini membidik kompetensi siswa

pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam proses pembelajaran yang didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang menekankan karakter siswa.

Pendidikan KMI dilaksanakan selama 24 jam, di mana proses belajar mengajar yang mengedepankan aspek akademis dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai pukul 15.00, selain waktu tersebut siswa mengalami proses pendidikan dengan sekian banyaknya kegiatan yang mendukung intra kurikuler dan ekstra kurikuler. Secara prinsip metode pendidikan KMI Gontor dilaksanakan dengan keteladanan, pengarahan, penugasan, pembiasaan, dan penciptaan lingkungan:

1. Keteladanan

Keteladanan dicontohkan oleh kyai, guru, dan siswa (santri). Metode ini sangat efektif dalam mendidik karakter, karena sebaik-baiknya pendidikan adalah dengan perbuatan, bukan sekadar dipidatoken.

2. Pengarahan

Setiap pekerjaan selalu diawali dengan pengarahan. Hal itulah yang diterapkan dalam proses pendidikan di Pondok Pesantren, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami nilai-nilai filosofis dari setiap apa yang dikerjakan, dan bukan hanya sekadar mengerjakan tugas dan kewajibannya.

3. Penugasan

Di antara metode yang benar dalam mendidik adalah dengan penugasan. Siswa dapat menghayati nilai-nilai pendidikan setelah mengerjakan tugas yang diberikan. Di KMI ini siswa diberi tanggung jawab untuk mengerjakan tugas dalam jumlah yang banyak, hal tersebut melatih siswa mampu memecahkan problem yang dihadapinya.

4. Pembiasaan

Metode pembiasaan yang diterapkan di KMI cukup efektif di dalam melatih siswa untuk melakukan hal-hal yang positif, karena siswa dibiasakan berdisiplin bahkan dengan sedikit paksaan.

5. Penciptaan lingkungan

Lingkungan yang kondusif mutlak ada dalam sistem pendidikan asrama, karena kondisi tersebut mendukung terciptanya milieu belajar yang sehat, segala apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh siswa adalah merupakan unsur-unsur yang mendidik.

Sesuatu yang menonjol dari kurikulum KMI Gontor ini adalah tentang pemahaman pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, KH. Imam Zarkasyi terhadap konsep ilmu. Ia menangkap bahwa Islam tidak memisahkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Maka dalam menggambarkan porsi materi pelajaran dalam kurikulum pesantren modern yang diterapkannya, ia menyatakan bahwa kurikulum KMI terdiri dari 100% agama dan 100% umum. Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan

umum itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu pengetahuan agama, dan sama pentingnya. latar belakang pemikirannya ini berangkat dari kenyataan bahwa sebab terpenting kemunduran umat islam adalah kurangnya ilmu pengetahuan umum pada diri mereka. Tidak banyak lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum seperti yang disebutkan di atas. Lain dari pada itu maraknya lembaga pendidikan yang hanya mengambil setengah kurikulum agama dan setengah kurikulum umum pada akhirnya dapat menimbulkan disintegrasi pendidikan.

Dengan adanya konsep kurikulum KMI ini, menjadikan Pondok Gontor tetap istiqomah dan konsisten. Aspek pertama, yaitu, nilai, sistem, dan materi pendidikan pondok pesantren. Nilai-nilai yang tertuang pada panca jiwa pondok mencerminkan hakikat pondok tersebut. Aspek kedua adalah sistem asrama yang penuh dengan disiplin. Sistem asrama ini mendukung terciptanya keterpaduan tripusat pendidikan: pendidikan sekolah (formal), pendidikan keluarga (informal), dan pendidikan masyarakat (nonformal). Aspek ketiga adalah materi, materi yang ada dalam pondok pesantren adalah mempresentasikan kurikulum yang ada, yaitu, kurikulum yang merupakan perpaduan antara ilmu agama (*revealed knowledge*) dan kauniyah (*acquired knowledge*). Jadi dalam pesantren tersebut telah terjadi intregasi ilmu. Di samping itu, adanya hidden curriculum di dalam pesantren ini dapat menunjang mutu pendidikannya. Dalam konteks kurikulum ini (*hidden curriculum*), pesantren merupakan lembaga pendidikan yang secara tidak langsung telah menerapkannya

sejak awal mula berdirinya hingga saat ini. Tujuan kurikulum KMI bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan dipersatukan secara integral dengan tujuan pendidikan pesantren secara keseluruhan. Sebagai sebuah pesantren, pendidikan di Gontor tidak berbeda dengan tujuan pesantren pada umumnya yaitu mencetak ulama.

1. Struktur kurikulum Kulliyatul Mua'limin Al-Islamiyah Gontor

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan adalah sistem semester sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran dan beban belajar.

Kegiatan santri Gontor dimulai dari pagi pukul 04.00 sampai pukul 22.00. Pada pukul 04.00 para santri sudah harus bangun untuk menunaikan shalat Subuh berjamaah, kemudian mandi, berolahraga, mengulang pelajaran, dan sarapan. Pada pukul 07.00 mereka masuk kelas KMI sampai pukul 12.00 siang, dilanjutkan dengan shalat Zuhur berjama'ah dan makan siang serta rehat sejenak. Pada pukul 14.00 mereka mendapat jam

tambahan sampai pukul 15.00. Adapun terkait pengaturan jadwal pelajaran eksakta seperti berhitung dan matematika, dijadwalkan di jam pelajaran pertama atau kedua. Pada jam pelajaran selanjutnya dijadwalkan secara acak, pelajaran-pelajaran lainnya. Kegiatan muhadlarah/khithobah (pidato) dilaksanakan pada malam senin (bahasa Inggris), malam jum'at (bahasa Indonesia) dan Kamis siang (bahasa Arab).

Tiga pilar pendidikan yang terdapat di Gontor, yakni sekolah (pendidikan formal), keluarga (santri dengan para guru dan pembimbing), serta masyarakat (lingkungan tempat mereka bermukim), dipenuhi seluruhnya dalam kehidupan pondok karena siswa juga menjadi santri yang menginap di pondok. Adapun guru, dosen, dan pengasuhnya adalah keluarga bagi santri. Selain kegiatan intra kurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstra kurikuler dan kokurikuler yang pelaksanaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bersifat Integratif

Memadukan intra kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler, dalam satu kesatuan sistem pendidikan pesantren yang mampu memadukan tri-pusat pendidikan: pendidikan keluarga, kelas, dan masyarakat. Pola seperti ini memungkinkan untuk terjadinya integrasi antara iman, ilmu, dan amal, antara teori dan praktik dalam satu kesatuan. Hal ini didukung oleh keberadaan santri di dalam pesantren selama 24 jam.

b. Bersifat komprehensif

Pendidikan yang komprehensif menyeluruh dan komplit, yang mengembangkan potensi santri menuju kesempurnaannya. Inti kurikulum satuan pendidikan KMI adalah pengembangan dirasat islamiyyah di mana santri tidak hanya belajar ilmu-ilmu keagamaan seperti Fiqh, Tafsir, dan Hadits saja, akan tetapi santri dikenalkan dengan berbagai bidang ilmu lain yang bermanfaat dalam kehidupannya. Pendidikan dilaksanakan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga dilaksanakan di luar kelas dengan berbagai kegiatan yang padat dan mendidik. Pendidikan dengan pola seperti ini memungkinkan untuk tidak mengenal dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama.

c. Bersifat mandiri

Kurikulum pendidikan satuan pendidikan KMI bersifat mandiri, sebagaimana tertuang dalam panca jiwa pondok. Kemandirian kurikulum tercermin pada independensi penentuan bahan ajar, proses pembelajaran, dan sistem penilaian. Perwujudan dari sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif, komprehensif, dan mandiri dalam sebuah interaksi positif antara siswa (santri), guru dan kyai dalam sebuah pola kehidupan pesantren dengan kyai sebagai sentral figur yang menjiwai dan masjid sebagai pusat kegiatan, menghasilkan pola pendidikan khas pesantren yang mengembangkan potensi santri dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Beban Belajar Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor

Pendidikan di Gontor dilaksanakan selama 24 jam, di mana proses belajar mengajar yang mengedepankan aspek akademis dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai pukul 12.15, selain waktu tersebut siswa mengalami proses pendidikan dengan sekian banyaknya kegiatan yang mendukung intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti oleh peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui, tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu adalah 34 jam pelajaran. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Sedangkan kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh santri. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap

muka mata pelajaran yang bersangkutan. Berikut ini kriteria beban belajar dalam kurikulum KMI

- a. Beban belajar dinyatakan dalam jam pelajaran perminggu. Beban belajar satu minggu adalah 34 jam pelajaran.
- b. Durasi setiap satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit.
- c. Beban belajar dalam satu semester minimal 12 minggu.
- d. Beban belajar kelas enam dalam semester genap minimal 9 minggu.
- e. Satuan pendidikan KMI melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket pada satuan pendidikan KMI adalah enam tahun bagi lulusan SD/MI dan empat tahun bagi lulusan SMP/MTs. Penyesuaian masa studi dalam durasi tertentu dapat diselenggarakan atas dasar pertimbangan kemampuan peserta didik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kalender Pendidikan Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup

permulaan tahun pelajaran, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kurikulum satuan pendidikan KMI diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun pembelajaran.

- a. Satuan pendidikan KMI menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan setempat, karakteristik pesantren, kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
- b. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- c. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.⁴

B. Manajemen Kurikulum

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* (melakukan). Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke Bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan

⁴ Siti Toyibah, “Pengembangan Kurikulum Model Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor di Pondok Pesantren Darul Qurro Kawungaten Cilacap”, Skripsi (Purwokerto:Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2018) , hal. 71-84

manager untuk orang yang melakukannya. Management diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan).⁵ Manajemen diartikan sebagai koordinasi semua sumber tenaga melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pemberi bimbingan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana dikutip oleh Mulyono, Sondang P. Siagian mendefinisikan manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dalam dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain.⁶ Sebagaimana dikutip oleh Abdul Haris Nasution, Habib Thoha menyatakan bahwa suatu aktivitas akan berjalan lancar dan teratur apabila didasarkan pada manajemen yang sehat dan didukung oleh kepentingan yang tepat dan handal.⁷ Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dari definisi manajemen, yaitu proses, mendayagunakan seluruh sumber organisasi, dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

⁵Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan edisi 4*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 5-6

⁶Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hal. 208

⁷Abdul Haris Nasution, “*Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa*”, (Studi Multi Kasus di MTsN Pucanglaban dan MTsN Bandung Tulungagung), (Program Studi Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Tulungagung, Tesis diterbitkan, 2015), hal. 21

Sedangkan kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang artinya tempat berpacu. *Curere* dalam kamus *Websters* jika menjadi kata benda berarti lari cepat, pacuan, balapan berkereta, berkuda, satu pengalaman tanpa henti, dan lapangan perlombaan. Kurikulum artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan penataan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai produktivitas pendidikan. Produktivitas dimaknai dengan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan.⁸ Jadi, manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian kurikulum.⁹ Dalam pelaksanaannya, manajemen kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sarana dan visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian

⁸Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal. 22.

⁹Rusman. *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 3

tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya.

Sebagaimana yang dikutip oleh M. Basyiruddin Usman, Harold B. Albery memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*). Sedangkan menurut Edward A. Krug menyebutkan sebagai berikut: *a curriculum consist of the means used to achieve or carry our given purposes of scholling*. Pengertian ini menunjukkan pada usaha-usaha yang mengarah pada tujuan pendidikan atau tujuan sekolah.¹⁰ Dengan demikian, kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan.

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Kurikulum

Sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Nasbi, Rusman mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu:

- a. *Produktivitas*, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.

¹⁰M. Basyiruddin Usman, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2012), hal. 34

- b. *Demokratisasi*, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi, yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. *Kooperatif*, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
- d. *Efektivitas* dan *efisiensi*, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut sehingga memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.
- e. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.¹¹

3. Perencanaan Kurikulum

a. Pengertian Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa kearah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Di dalam

¹¹Ibrahim Nasbi, *Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis*, Jurnal Idaarah, Vol. I, No. 2, Desember 2017, dalam journal.uin-alauddin.ac.id, diakses pada Selasa, 7 Januari 2020 pukul 21.54 WIB, hal 320-321.

perencanaan kurikulum minimal ada lima hal yang memengaruhi perencanaan dan pembuat keputusan, yaitu filosofis, materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran.

Maksud dari manajemen perencanaan kurikulum adalah keahlian “*managing*” dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional.

Sebagaimana dikutip oleh Oemar H. Malik, J.G Owen mengemukakan bahwa pada pendekatan yang bersifat “*administrative approach*” kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi *from the top down*, dari atas ke bawah atas inisiatif administrator. Dalam kondisi ini guru-guru tidak dilibatkan. Mereka lebih bersifat pasif yaitu sebagai penerima dan pelaksana di lapangan. Semua ide, gagasan dan inisiatif berasal dari pihak atasan.¹²

Sebaliknya pada pendekatan yang bersifat “*grass roots approach*” yaitu yang dimulai dari bawah, yakni dari pihak guru-guru atau sekolah-sekolah secara individual dengan harapan bisa meluas ke sekolah-sekolah lain. Kepala sekolah serta guru-guru dapat merencanakan kurikulum atau perubahan kurikulum karena melihat

¹²Oemar H.Malik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 150

kekurangan dalam kurikulum yang berlaku. Mereka tertarik oleh ide-ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya di sekolah mereka untuk meningkatkan mutu pelajaran.

Dengan bertindak dari pandangan bahwa guru adalah manajer (*the teacher as manager*) J.G Owen sangat menekankan perlunya keterlibatan guru dalam perencanaan kurikulum. Guru harus ikut bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, karena dalam praktik mereka adalah pelaksana-pelaksana kurikulum yang sudah disusun bersama¹³

Rusman dalam bukunya “Manajemen Kurikulum” memberikan definisi perencanaan kurikulum merupakan perencanaan-perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa. Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi peran unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen lembaga pendidikan. Disamping itu, perencanaan

¹³Ibid , hal.151

kurikulum juga berfungsi sebagai pendorong untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal.¹⁴

b. Fungsi Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum harus dilakukan dengan cara yang cermat, teliti, menyeluruh dan terinci, serta mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan penerapan rencana kurikulum tersebut. Menurut Hamalik, perencanaan kurikulum memiliki fungsi, antara lain 1) Pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan organisasi; 2) penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. perencanaan kurikulum yang matang, besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dan oleh seni kepemimpinan dan pengetahuan yang dimilikinya; 3) motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.

Perencanaan kurikulum merupakan sebuah pedoman, penggerak, dan juga sebagai motivasi dalam implementasi kurikulum. Jika sebuah kurikulum dihasilkan tanpa perencanaan yang baik maka ibarat sebuah peta yang dibuat dengan tidak tepat dan dibawa berlayar

¹⁴Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hal. 21

oleh perahu yang berjalan di tengah samudra, dapat di bayangkan apa yang akan terjadi. Peta itu akan membawa perahu pada dermaga yang bukan menjadi tujuannya. Dalam pendidikan pun demikian, jika kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum yang tidak direncanakan dengan baik, sudah tentu tujuan pembelajaran tidak akan pernah tercapai dengan baik pula.¹⁵

c. Prinsip-prinsip Perencanaan Kurikulum

Dalam menyusun dan mempersiapkan sebuah kurikulum secara umum perlu memperhatikan beberapa prinsip perencanaan kurikulum agar perencanaan tersebut realistis dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Menurut Din Wahyudin dalam Hamalik, ada enam prinsip perencanaan kurikulum yang harus diperhatikan, diantaranya:

- 1) Perencanaan kurikulum berkenaan dan berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman para siswa
- 2) Perencanaan kurikulum dibuat berdasar berbagai keputusan tentang isi dan proses, yang tidak terlepas dari isi, materi, pokok bahasan, bidang studi serta berkait erat dengan proses dan cara penyampaian atas isi tersebut
- 3) perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang isu dan topik

¹⁵Din Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal.

- 4) perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak, di antara lain kelompok guru mata pelajaran, kepala sekolah, pemerhati pendidikan, orang tua, stakeholder dan pihak-pihak lain yang terkait
- 5) perencanaan kurikulum dilaksanakan di berbagai tingkat/jenjang
- 6) Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkesinambungan.

Dalam merencanakan kurikulum, pengalaman-pengalaman siswa ketika mengikuti pembelajaran dikelas dan pengalaman siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus dipertimbangkan. Pembelajaran akan lebih berarti dan lebih menyentuh siswa ketika berkenaan dan berkaitan dengan pengalamannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pengembangan kurikulum di Indonesia diarahkan kepada penguasaan berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk mempertahankan hidup

Isu-isu dan permasalahan yang *“up to date”* juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan kurikulum, mengingat pengembangan kurikulum diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan dan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Dengan demikian, kurikulum akan dengan mudah tidak lagi relevan atau tidak mampu lagi menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi masyarakat¹⁶

¹⁶Ibid, hal. 83-84

d. Model-model Perencanaan Kurikulum

Berkenaan dengan model/desain kurikulum, ada beberapa macam model pilihan yang harus ditelaah dan dianalisis oleh para pengambil kebijakan maupun para guru yang terkait langsung dalam mengembangkan kurikulum sekolahnya masing-masing. Ada lima hal yang harus mempengaruhi pembuat keputusan perencanaan atau desain kurikulum yaitu filosofis, konten atau materi, manajemen pembelajaran, pelatihan bagi perancang kurikulum dan sistem pembelajaran itu sendiri.

Berkenaan dengan model perencanaan kurikulum John D. Mc. Neil membagi menjadi empat model sebagaimana dikutip oleh Rusman, yaitu model kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, kurikulum sistemik dan model kurikulum akademik. Berikut merupakan beberapa uraian mengenai model kurikulum, diantaranya sebagai berikut:

1) Model Kurikulum Humanistik

Karakteristik kurikulum humanistik ini ialah fungsi kurikulum menyediakan pengalaman yang bersifat naluriah yang dapat memberikan kontribusi terhadap kebebasan dan pengembangan totalitas pribadi. bagi mereka tujuan pendidikan berhubungan dengan pertumbuhan pribadi yang ideal, integritas dan otonom, kepribadian yang mantab dan mengembangkan

aktualisasi diri. Seseorang dianggap berkualitas tidak hanya dilihat dari kecakapan kognitifnya, tetapi juga dari sisi estetis dan moral.

Peranan guru dalam desain kurikulum humanistik yakni memberikan dan menyediakan layanan yang hangat dalam proses pengembangan potensi siswa dan atas dasar emosi yang positif. Kedudukan guru dalam hal ini sebagai fasilitator dan mediator. Guru membangun hubungan yang positif dan pembelajaran dilakukan bukan atas dasar kepentingan guru, tetapi komitmen bahwa setiap anak dapat belajar. Guru memiliki asumsi bahwa dalam sebuah peranan kepemimpinan dan pembelajaran efektif, belajar hendaklah menyentuh emosi mereka sebagai siswa yang memiliki keunikan masing-masing.

Kurikulum humanistik merupakan kurikulum terpadu yang memiliki esensi perintegrasian terhadap domain afektif, yaitu emosi, kepribadian dan nilai dengan domain kognitif yaitu intelektual dan kemampuan lainnya. Sebagaimana dikutip oleh Mujahidil Mustaqim, menurut Mc. Neil adapun ciri-ciri dari kurikulum humanistik adalah sebagai berikut:

- a) Partisipasi, peserta didik terlibat secara aktif merundingkan apa yang akan dipelajarinya, tidak ada paksaan secara otoriter dan unilateral.

- b) Integrasi, artinya ada interpenetrasi dan integrasi antara pikiran, perasaan, dan tindakan (kognitif, afektif, dan psikomotor).
- c) Relevansi, artinya terdapat kesesuaian antara materi pelajaran dan kebutuhan pokok, serta kehidupan anak ditinjau dari segi emosional dan intelektual.
- d) Diri anak, merupakan sasaran utama yang harus dipelajari agar dapat mengenal dirinya.
- e) Tujuan, yaitu mengembangkan diri anak sebagai suatu keseluruhan (pribadi yang utuh) dalam masyarakat manusiawi.¹⁷

2) Model Kurikulum Sistemik

Kurikulum sistemik sebagai kendaraan yang mengantar isi materi menjadi efektif dan efisien. Kurikulum berbasis standar ini membuktikan kecondongan pada tujuan kurikulum. Cakupan pokok dari kurikulum sistemik adalah pada suatu kontrol/pengendalian. Tujuan yang akan dicapai ditentukan sesuai dengan standarisasi/patokan. Tujuan pembelajaran, acuan-acuan, hasil percobaan, dan indikator lain digunakan untuk mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan dan patokan-patokan, dan jika ada kebutuhan, maka ada modifikasi-modifikasi.

¹⁷Mujahidil Mustaqim, *Is true learning in elementary school dominated by humanistic curriculum?*, (Universitas Pendidikan Indonesia), Dalam icerd 2017.conference.upi.edu diakses pada Senin, 7 Januari 2020 pukul 22.12 WIB

Kurikulum sistemik yang dilaksanakan memiliki maksud untuk mencapai tujuan, harus memiliki perencanaan dan langkah yang diambil serta modifikasi langkah tersebut jika diperlukan, meliputi tujuan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan. R. Liin menandai sistem tanggung jawab bidang pendidikan dari desain kurikulum ini sebagaimana berikut:

- a) Mengembangkan isi dan standar hasil yang berfokus kepada pembelajaran siswa.
 - b) Menekankan pengukuran dari prestasi siswa sebagai suatu dasar untuk tanggung jawab sekolah.
 - c) Mengembangkan suatu ukuran untuk mengevaluasi sekolah-sekolah.
 - d) Memperkenalkan penghargaan, hukuman dan intervensi untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Model Kurikulum Subjek Akademik

Desain kurikulum disiplin ilmu beranjak dari asumsi yang mendasari model ini, yaitu fungsi sekolah pada dasarnya untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak. Desain kurikulum ini dinamakan juga desain kurikulum subjek akademik. Menurut Longstreet, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat kepada pengetahuan (*the knowledge centered design*) yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa.

Model kurikulum ini dikembangkan oleh para ahli mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Mereka menyusun materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa baik menyangkut data dan fakta, konsep maupun teori yang ada dalam disiplin ilmu mereka masing-masing. Materi pembelajaran tentu saja disusun sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.¹⁸

e. Komponen-komponen Perencanaan Kurikulum

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa aspek dalam perencanaan kurikulum meliputi perencanaan terhadap desain, implementasi, dan evaluasi. Tiga komponen tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan yang disebut produk. Produk inilah yang selanjutnya dijadikan pegangan dan pedoman dalam menjalankan pendidikan di sekolah.

Sebagaimana dikutip oleh S. Nasution, Ralph W. Tyler dalam bukunya *Basic Principles of Curriculum and Instruction* menyebutkan komponen-komponen apa saja yang perlu direncanakan, secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1) tujuan, diperlukan untuk memberikan arah pada kegiatan yang dilakukan; 2) isi, merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan; 3) aktivitas belajar, adalah berbagai aktivitas yang diberikan para pembelajar dalam situasi belajar-mengajar; 4) sumber belajar, sumber yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan antara

¹⁸Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hal. 31-59

lain buku dan bahan cetak, perangkat lunak komputer, media audiovisual; 5) evaluasi, berguna untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan tujuan, dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan terbuka.¹⁹

4. Pelaksanaan Kurikulum

a. Pengertian Pelaksanaan Kurikulum

Pembelajaran di kelas merupakan tempat melaksanakan kurikulum dan menguji kurikulum. Pembelajaran selalu berkaitan dengan semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat dan kemampuan guru diuji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Oleh karena itu, guru adalah kunci pemegang pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum. Guru bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan penilai serta pengembang kurikulum yang sebenarnya

Beuchamp sebagaimana dikutip oleh Agus ZainulFitri mengartikan implementasi kurikulum sebagai *“a process of putting the curriculum to work”*. Fullan mengartikan implementasi kurikulum sebagai *“the putting into practice of an idea, program, or set of activities which is new to the individual or organizational using it”*.²⁰ Sebagaimana yang dikutip oleh M. Basyiruddin Usman, Harold Albery memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang

¹⁹S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, Ed. 2 Cet. 12, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 17-18

²⁰Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam dari NormatifFilosofis ke Praktis*, . (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 39

diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*).²¹

Di dalam melaksanakan kurikulum setiap guru perlu memiliki kompetensi kompetensi sebagai berikut:

- 1) Pemahaman esensi dari tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Apakah tujuannya diarahkan pada penguasa ilmu, teori atau konsep, penguasaan kompetensi akademis atau kompetensi kerja, ditujukan pada penguasaan kemampuan memecahkan masalah, atau pembentukan pribadi yang utuh. Penguasaan esensi dari tujuan kurikulum sangat memengaruhi penjabarannya, baik dalam penyusunan rancangan pengajaran maupun dalam pelaksanaan kurikulum.
- 2) Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik.
- 3) Kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran.²²

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses menyebutkan bahwa pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Berubahnya paradigma siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu

²¹Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: PT. Rjagrafindo Persada, 2012, hal. 3

²²Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 75-76

- b) Berubahnya paradigma guru sebagai satu-satunya sumber menjadi pembelajaran yang menggunakan beragam sumber belajar
- c) Menekankan pendekatan ilmiah, tidak lagi pendekatan tekstual
- d) Berubahnya paradigma pembelajaran berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi
- e) Pembelajaran bersifat terpadu bukan lagi parsial (terpisah-pisah)
- f) Pembelajaran mengakomodasi banyak jawaban, bukan jawaban tunggal, di mana sifatnya lebih multidimensi.
- g) Bersifat aplikatif dan bukan verbalisme
- h) Seimbang antara *soft skills* (keterampilan bersifat mental) dan *hard skills* (keterampilan bersifat fisik)
- i) Mengembangkan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life long learner*)
- j) Pembelajaran harus memberikan nilai keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik
- k) Pembelajaran tidak hanya akan berlangsung di sekolah tetapi juga di rumah dan di masyarakat

- l) Pembelajaran dengan pendekatan bahwa siapa saja dapat memberikan informasi, dan siapa saja dapat belajar, serta kelas yang dapat berada di manapun (belajar di mana saja)
- m) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien
- n) Semua perbedaan baik individual, latar belakang budaya, dan lain-lain diakui dalam pembelajaran.

b. Tahap-tahap Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum juga diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran.²³ Secara garis besar tahap implementasi kurikulum meliputi:²⁴

1) Tahap perencanaan implementasi

Tahap ini bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi (operasional) yang ingin dicapai. Dalam setiap penetapan berbagai elemen yang akan digunakan dalam proses implementasi yang meliputi: a) tujuan yang ingin dicapai, b) pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran dan waktu, c) evaluasi setiap alternatif, d) penentuan alternatif yang paling tepat.

2) Tahap pelaksanaan implementasi

Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan *blue print* yang telah disusun dalam perencanaan dengan menggunakan sejumlah

²³Din Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 2

²⁴Ibid, hal. 103

teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya.

3) Tahap evaluasi implementasi

Tahap ini bertujuan untuk melihat 2 hal yaitu: melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol, misalnya apakah pelaksanaan evaluasi telah sesuai dengan rencana dan sebagai fungsi perbaikan, lalu melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode, sarana dan prasarana, anggaran personal dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan.

Pelaksanaan/implementasi kurikulum memiliki tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu a) karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya; b) strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum; c) karakteristik penggunaan kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran.²⁵

²⁵Ibid, hal. 26

5. Evaluasi Kurikulum

a. Pengertian Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam manajemen, karena evaluasi ini akan menghasilkan data apakah pelaksanaan dari suatu program sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan atau belum. Selain itu hasil evaluasi biasanya juga dijadikan sebagai pijakan untuk menentukan program baru dimasa mendatang. Demikian juga dalam konteks manajemen kurikulum, evaluasi kurikulum memegang peranan yang sangat penting, baik untuk penentuan kebijakan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan.²⁶

Seperti yang diungkapkan Ibrahim Nasbi dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Kurikulum: sebuah kajian teoritis” yaitu Evaluasi kurikulum adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi/ data untuk menentukan sejauhmana siswa telah mencapai tujuan

²⁶Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam dari Normatif Filosofis ke Praktis*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 43

pembelajaran.²⁷ Hal ini juga senada dengan Teguh Triwiyanto dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran” bahwa evaluasi kurikulum didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar-standar kurikulum.²⁸

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran dan penilaian (*test, measurement, and assessment*). Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui stimulus atau pertanyaan. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran dan bagian tersempit dalam evaluasi.²⁹

Evaluasi kurikulum yang efektif lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan evaluasi tidak hanya didasarkan pada hasil pengukuran saja, dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan. Baik yang didasarkan pada hasil pengukuran maupun bukan pengukuran, pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program

²⁷Ibrahim Nasbi, Manajemen kurikulum: sebuah kajian teoritis, dalam jurnal JURNAL IDAARAH, VOL. I, NO. 2, DESEMBER 2017 diakses pada Rabu tanggal 3 Februari 2020 pukul 10.35 WIB, hal.328

²⁸Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: bumi aksara,2015), hal.184

²⁹Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.28

atau kurikulum.³⁰ Agar evaluasi yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang hasil belajar peserta didik maka dalam evaluasi perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Berorientasi pada hasil kompetensi. Evaluasi yang dilakukan harus berfungsi untuk mengukur hasil peserta didik dalam pencapaian kompetensi.
- 2) Valid. Evaluasi yang dilakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu dalam evaluasi memerlukan alat ukur yang dapat menghasilkan pengukuran yang valid.
- 3) Adil. Penilaian yang dilakukan harus adil untuk semua peserta didik. Peserta didik harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama.
- 4) Menyeluruh. Unsur menyeluruh dalam evaluasi bahwa evaluasi dilakukan harus mampu mengevaluasi semua kompetensi yang ada dalam kurikulum meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.
- 5) Bermakna. Hasil evaluasi harus mempunyai makna bagi peserta didik. Hasil evaluasi harus dapat memberikan gambaran tentang hasil belajar peserta didik, keunggulan dan kelemahan peserta didik, minat, serta potensi peserta didik dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan.³¹

³⁰Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hal. 21

³¹Adi Suryanto, dkk, *Evaluasi Pembelajaran Di SD*, (Tangerang : Universitas Terbuka, 2014), hal. 11-12

b. Prinsip-prinsip Evaluasi Kurikulum

Menurut Hamalik, Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan tertentu, artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum.
- 2) Bersifat objektif, dalam arti berpijak pada keadaan sebenarnya, bersumber pada data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrument yang handal.
- 3) Bersifat komprehensif, mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum dilakukan pengembalian keputusan.
- 4) Koorperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan. Pelaksanaan dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan suatu tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, kepala sekolah, penilik, orang tua, bahkan siswa itu sendiri, di samping tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan.
- 5) Efisen, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Oleh karena itu, harus

diupayakan hasil evaluasi yang tinggi, atau paling tidak seimbang dengan materil yang digunakan.

- 6) Berkesinambungan, hal ini diperlukan mengingat tuntutan dari dalam dan luar sistem sekolah, yang meminta diadakan perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangat penting, karena mereka yang paling mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan kurikulum.

c. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu kurikulum yang diterapkan pada pendidikan. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai efisiensi efektifitas, manfaat, dampak, dan berkelanjutan dari suatu kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum adalah mengukur capaian kurikulum, yang sejauh mana kurikulum dapat dilaksanakan.³² Evaluasi kurikulum memiliki banyak fungsi antara lain:

- 1) Edukatif, untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Instruksional, untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.
- 3) Diagnosis, untuk memperoleh informasi masukan dalam rangka perbaikan kurikulum pendidikan.

³²Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara,2015), hal.184

- 4) Administratif, untuk memperoleh informasi masukan dalam pengelolaan program pendidikan.³³

Sedangkan tujuan dilaksanakannya evaluasi kurikulum antara lain:

- 1) Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan.
- 2) Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu.
- 3) Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum.
- 4) Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum.³⁴

d. Peran Evaluasi Kurikulum

Evaluasi sering dijadikan langkah akhir dalam keseluruhan proses. Siswa dievaluasi pada akhir suatu kegiatan pembelajaran. Kurikulum diimplementasikan untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Pada praktiknya, evaluasi mempunyai hakikat yang sangat luas. Siswa sering diuji untuk mengidentifikasi bidang masalah. Guru menerima laporan efektivitasnya. Kurikulum dapat menjadi bidang pengujian selama pengembangan untuk

³³Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 25

³⁴Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 42-43

memastikan ketepatan tingkatan kelas tertentu berkenaan dengan serangkaian keterampilan dan isi yang mereka rancang untuk pembelajaran.

Evaluasi formatif meliputi pembuatan dan penilaian dan usaha untuk menentukan sebab-sebab khusus. Informasi yang diperoleh dalam evaluasi formatif memberi kontribusi terhadap revisi program. Hal ini memungkinkan pengembang kurikulum untuk mengubah dan mengembangkan kurikulum sebelum menetapkan bentuk final. Perbedaan mendasar antara dua tipe evaluasi ini menyangkut bagaimana evaluasi diperlakukan, apa yang akan dievaluasi, dan bagaimana hasilnya akan digunakan.³⁵

e. Model Evaluasi

Macam-macam model evaluasi yang digunakan bertumpu pada aspek-aspek tertentu yang diutamakan dalam proses pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Ada beberapa model evaluasi kurikulum yaitu:³⁶

1) Evaluasi kurikulum model penelitian (*Research evaluasi model*)

Model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologi serta eksperimen lapangan. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah *comparative*

³⁵Din Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 152

³⁶ Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 152

approach, yaitu dengan mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok anak. Beberapa kesulitan model evaluasi ini adalah kesulitan dalam masalah administrasi, masalah teknis dan logis, sulitnya mengontrol pengaruh guru dan keterbatasan manipulasi eksperimen yang dapat dilakukan.

2) Model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan (*Goal/objective Oriented Evaluation Model*)

Model *Goal/objective Oriented Evaluation*, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain tetapi diukur dengan seperangkat tujuan dan kompetensi tertentu. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penguasaan siswa akan tujuan-tujuan atau kompetensi tertentu. Ada beberapa syarat untuk mengembangkan model obyektif antara lain ada kesepakatan tentang tujuan-tujuan kurikulum, merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam bentuk perbuatan siswa, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan.

- 3) Model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan (*Goal free Evaluation Model*)³⁷

Model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Menurut pendapat Scriven, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya. Caranya dengan memperhatikan dan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif yang diharapkan maupun hal-hal negatif yang memang tidak diharapkan.

- 4) Model campuran multivariasi\

Model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Model ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dan masing-masing kurikulum. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam evaluasi model campuran multivariasi adalah mencari dan menentukan sekolah yang berminat untuk dievaluasi atau diteliti. Pelaksanaan program, bila tidak ada percampuran sekolah, maka tekanannya pada partisipasi yang optimal. Sementara tim menyusun tujuan yang meliputi semua

³⁷Ibid, hal. 154

kompetensi dalam pelajaran, umpamanya dengan metode global dan metode unsur, dapat disiapkan tes tambahan. Apabila semua informasi yang diharapkan semua telah terkumpul, maka mulailah pekerjaan komputer. Tipe analisis juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh bersama beberapa variabel yang berbeda.

5) Model *Evaluation Programs for Innovative Currikulum* (EPIC)

Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Kubus tersebut memiliki tiga bidang, bidang pertama adalah perilaku (*behavior*) yang meliputi perilaku *cognitive*, *affective*, dan *psychomotor*. Bidang kedua adalah pembelajaran (*instruction*), yang meliputi organisasi, materi, metode, fasilitas atau sarana, dan pendanaan. Bidang ketiga adalah kelembagaan (*institution*) yang meliputi guru, murid, administrator, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

6) Model CIPP (*context, input, process, and product*)³⁸

Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem, maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CIPP, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen-komponen CIPP.

³⁸ Muhammad Zaini, *Pengembangan Kurikulum: Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*. (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 156

Model ini mengemukakan bahwa untuk melakukan penilaian terhadap program pendidikan diperlakukan empat macam jenis penilaian yaitu (1) penilaian konteks (*context*) yang berkaitan dengan tujuan. Evaluasi konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan, populasi, dan sampel yang dilayani serta tujuan pembelajaran. Kebutuhan siswa apa saja yang belum terpenuhi, tujuan apa saja yang belum tercapai, dan tujuan apa saja yang telah tercapai. (2) penilaian masukan (*input*) yang berguna untuk pengambilan keputusan desain. Maksud evaluasi masukan adalah kemampuan awal siswa dan kemampuan sekolah dalam menunjang program pendidikan. (3) penilaian proses (*process*) yang membimbing langkah operasional dalam pembuatan keputusan. Penilaian proses ini menunjuk pada apa kegiatan yang dilakukan dalam program, apakah pelaksana kurikulum tetap sanggup melakukannya, siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya, apakah sarana dan prasarana telah dimanfaatkan dengan baik, kapan akan diselesaikan, dan apakah pelaksanaan program dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. (4) penilaian keluaran yang memberikan data sebagai bahan pembuatan keputusan (*product*).³⁹ Penilaian keluaran adalah tahap akhir serangkaian evaluasi program kurikulum, yang diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan

³⁹Ibid, hal. 157

perubahan yang terjadi pada siswa. Apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Pernyataan apa yang perlu dirumuskan berkaitan dengan proses dan pencapaian hasil. Kebutuhan apa saja yang telah terpenuhi para siswa. Apakah dampak yang dirasakan siswa dalam beberapa waktu tertentu.

Selain itu kelebihan CIPP dari keempat komponennya yang diungkapkan Hasan yang dikutip oleh Nurcahyani bahwa model CIPP tidak hanya dapat dilakukan ketika inovasi akan atau belum dilaksanakan, melainkan model CIPP tetap dapat dilakukan kendati suatu satuan pendidikan telah melaksanakan pengembangan kurikulumnya tersebut. Hal ini lah yang melatar belakangi peneliti menggunakan model evaluasi CIPP karena ketika peneliti tiba di lapangan, kurikulumnya telah berlangsung⁴⁰

C. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu berarti berbicara tentang sesuatu bisa berupa barang atau jasa. Barang yang bermutu adalah yang sangat bernilai bagi seseorang yang biasanya berhubungan dengan kebaikan (*goodness*), keindahan (*beauty*), kebenaran (*truth*), dan idealitas. Sedangkan jasa yang

⁴⁰Nurcahyani, *Evaluasi Kurikulum*, Jurnal Mahasiswa Unesa, 2013, Dalam jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jmtp/article/view/1607/5150, Diakses pada Sabtu 8 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB

bermutu adalah pelayanan yang diberikan seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan, tidak ada keluhan.⁴¹

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah yang ada.⁴²

Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.⁴³ Sebagaimana yang dikutip oleh Sagala menurut Edward Sallis mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Absolut dapat diartikan sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang tinggi dan tidak dapat diungguli. Adapun mutu yang relatif memiliki arti sebagai suatu yang melekat pada sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya.

Menurut Edward Deming yang diakui sebagai bapak mutu menyatakan bahwa mutu atau kualitas adalah kesesuaian dengan

⁴¹Engkoswara dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 304

⁴²Faturrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 30

⁴³Haris Syamsudin, “*Manajemen Strategik Lembaga Pendidikan Islam dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*” (Studi Multi Kasus di MTsN Kunir Blitar dan SMP Islamic Boarding School Ar-Rohman Malang)” (Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Tesis tidak diterbitkan, 2013), Dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, Diakses Pada Kamis, 16 Januari 2020 Pukul 21.36 WIB

kebutuhan pasar atau apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Adapun menurut Joseph Juran menyatakan bahwa kualitas adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan kepuasan pelanggan atau kualitas sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi. Dalam konteks pendidikan, mutu mencakup *input*, proses, *output* pendidikan.⁴⁴

Sagala menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat, mencakup *input*, proses, *output* pendidikan.⁴⁵

Dalam pengertian mutu mengandung makna dan derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja atau upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* atau *intangibile*. Mutu yang *tangible* artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku. Misalnya televisi yang bermutu karena mempunyai daya tahan (tidak cepat rusak), warna gambarnya jelas, suara terdengar bagus, dan suku cadangnya mudah didapat, perilaku yang menarik dan sebagainya. Sedangkan mutu yang *intangibile* adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung

⁴⁴E. Mulyasa, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 157

⁴⁵Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 170

dilihat atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami, misalnya suasana disiplin, keakraban, kebersihan dan sebagainya.⁴⁶

Pengertian mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya serata penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa tes hasil kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, UAS, dan UN). Dapat pula dibidang lain seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya computer, beragam jenis tekni, jasa, dan sebagainya. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya.⁴⁷

Mutu pendidikan yang tinggi tentu diperlukan desentralisasi terhadap fungsi-fungsi manajemen sekolah untuk mengoptimalkan

⁴⁶B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 210

⁴⁷B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 210

kebijakan pada tingkat manajemen sekolah dalam melaksanakan programnya. Desentralisasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen ini memberikan kewenangan kepada kepala sekolah bersama seluruh personal sekolah untuk menentukan visi dan misi, menyusun perencanaan sekolah, membagi tugas kepada seluruh personal, memimpin penyelenggaraan program, melakukan pengawasan dan perbaikan sesuai dengan keperluan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa peranan antara para profesional, orang tua, dan masyarakat saling melengkapi memenuhi tuntutan kualitas sekolah.⁴⁸

Sementara itu ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu: kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *educational production function* atau input-input analisis yang tidak konsisten; penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Dalam proses peningkatan mutu agar tetap terkontrol dan mutu tetap terjaga bahwa harus ada standar yang mengatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut. Pemikiran seperti ini telah mendorong munculnya pendekatan baru yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan yang mampu

⁴⁸Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 170

memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki sekolah sehingga tujuan dapat tercapai.⁴⁹

b. Indikator Mutu Pendidikan

Setelah memahami pengertian mutu sekiranya perlu mengetahui pula dimensi-dimensi mutu pendidikan. Gravin dalam Rois Abin menjelaskan bahwa terdapat delapan dimensi kualitas pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Kinerja (*performance*) yaitu berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang mempertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. Hal ini berarti bahwa kinerja pendidik dan stakeholder dalam pendidikan sangat menentukan mutu pendidikan.
2. *Futures* yaitu keistimewaan tambahan atau karakteristik tambahan yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, karena tidak semua lembaga pendidikan dapat memiliki keistimewaan tambahan tertentu untuk mencapai mutu pendidikan.
3. Keandalan (*reliability*) merupakan karakteristik yang merefleksikan keberhasilan penggunaan suatu produk. Dalam hal ini menjadi bukti bahwa pendidik maupun peserta didik termasuk alumni mampu menerapkan kompetensi yang harus dikuasai sebagai produk dari pendidikan itu sendiri.

⁴⁹Aminatul Zahro, *Total Quality Management: Teori dan Praktik Manajemen untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 21

4. Konformitas (*conformance*) merupakan kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Karakter desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan.
5. Daya tahan (*durability*) merupakan banyak waktu yang terus digunakan oleh lembaga pendidikan. Semakin lama lembaga pendidikan menyelenggarakan proses pendidikan berarti memiliki daya tahan tinggi, yang tentu terus mendapat kepercayaan masyarakat yang tinggi pula.
6. Kemampuan pelayanan (*serviceability*) merupakan karakter yang menunjukkan kecepatan, kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan yang tepat dan akurat dalam melayani pengguna pendidikan baik pendidik, peserta didik maupun masyarakat.
7. Estetika (*aesthetic*) merupakan karakter mengenai keindahan yang bersifat subjek, sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi refleksi dari pilihan pribadi.
8. Kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*) merupakan karakteristik yang berkaitan dengan reputasi (*brand name, image*).⁵⁰

⁵⁰M. Rois Abin, "Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi multikasus di Madrasah Aliyah Negeri Kunir Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar dan Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar)" (Program Magister Manajemen Pendidikan Islam

c. Peran Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditemukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (*content*) serta menciptakan tantangan agar peserta didik tumbuh dan berkembang secara intelektual dan proses pencapaiannya melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada manfaat dan relevansinya terhadap peserta didik.

Sekolah harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan melibatkan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar peserta tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif, dan bijaksana. Memiliki karakter dan memiliki kematangan emosional.⁵¹ Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini, yaitu:

- a. Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan peserta didik.
- b. Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada peserta didik sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

Pascasarjana IAIN Tulungagung, Tesis tidak diterbitkan, 2014), Dalam repo.iaintulungagung.ac.id, Diakses pada Rabu, 1 Januari 2020 Pukul 14.22 WIB.

⁵¹Faturrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 31

- c. Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat progres pencapaian kurikulum, siswa harus dinilai melalui tes yang dibuat sesuai dengan standar nasional dan menyangkut berbagai aspek kognitif, psikomotorik, afektif, maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara objektif kepada orang tua mengenai anak mereka, siswa dan sekolah yang bersangkutan maupun sekolah yang lain mengenai performa sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan.

Semua pelajar berbeda satu sama lainnya, dan mereka belajar dengan model yang cocok dengan kebutuhan dan kecenderungan mereka. masing-masing. Institusi pendidikan yang menggunakan prosedur mutu terpadu harus menangkap secara serius isu-isu tentang gaya dan kebutuhan pembelajaran untuk menciptakan strategi individualisasi dan diferensiasi dalam pembelajaran. Pelajar adalah pelanggan utama, dan jika model pembelajaran tidak memenuhi kebutuhan individu masing-masing mereka, maka itu berarti bahwa institusi tersebut tidak dapat mengklaim bahwa ia telah mencapai mutu terpadu.

Masih banyak hal yang harus dilakukan menyangkut bagaimana menerapkan prinsip-prinsip TQM (*Total Quality Management*) dalam ruang kelas. Beberapa elemen bisa saja melibatkan pola berikut.

Sebuah langkah awal bisa dimulai dengan kerja sama pelajar dan guru dalam menetapkan misi mereka. Dari sini, negosiasi bisa saja terjadi agar kedua belah pihak bisa mencapai misi gaya pembelajaran dan pengajaran serta sumber daya yang diperlukan. Masing-masing pelajar dapat merundingkan rencana aksi mereka untuk dapatkan motivasi dan arahan. Proses negosiasi mungkin memerlukan pembentukan sebuah forum yang memberikan umpan balik serta kesempatan kepada para pelajar agar mereka dapat mengatur sendiri pembelajaran mereka. Orang tua atau sponsor kerja dapat menjadi representasi yang baik bagi forum tersebut. Pengawasan yang detail harus dilakukan baik oleh para guru maupun pelajar untuk memastikan bahwa semua sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Penciptaan rangkaian umpan balik yang terus menerus merupakan elemen penting dalam proses jaminan mutu apapun. Evaluasi juga harus menjadi proses yang berkelanjutan dan tidak boleh tertinggal sampai akhir program studi. Hasil dari proses evaluasi harus dibicarakan dengan murid, dengan tujuan untuk melengkapi hasil evaluasi. Sikap melibatkan seluruh elemen akan sangat membantu dalam membangun kecakapan analitis para pelajar. Institusi pendidikan juga harus menggunakan hasil pengawasan formal untuk menetapkan keabsahan program-programnya. Institusi pendidikan harus siap untuk melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kinerja pelajar yang belum sesuai dengan harapan dan keinginan

mereka. Sebagaimana yang diketahui oleh para guru, hal ini bukan hal yang mudah. Karena hal ini bisa saja menjadi pengalaman emosional yang dapat membawa perubahan yang tak terduga. Yang perlu ditegaskan adalah langkah-langkah perbaikan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan pengalaman praktik kepada para pelajar tentang penggunaan TQM yang dapat menyesuaikan diri dalam situasi apapun.⁵²

D. Pondok Pesantren

1. Pengertian Madrasah

Madrasah merupakan sebuah kata dalam bahasa Arab yang artinya sekolah. Asal katanya yaitu darasa (baca: darosa) yang artinya belajar. Di Indonesia, madrasah dikhususkan sebagai sekolah (umum) yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keIslaman. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki ciri khas dari lembaga yang lain, menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah nomor 28 dan 29 tahun 1990 madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Adapun beberapa ciri madrasah dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁵²Edward Sallis, *Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), hal 86-89

- a. Lembaga pendidikan mempunyai tata cara yang sama dengan sekolah.
- b. Sekolah yang memiliki ciri khas yaitu keagamaan.
- c. Mata pelajaran agama Islam di madrasah dijadikan mata pelajaran pokok disamping mata pelajaran umum.

Dari segi jenis madrasah berdasarkan kurikulum dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Madrasah diniyah yaitu, suatu madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti madrasah diniyah awwaliyah, madrasah diniyah wusto, dan madrasah diniyah ulya.
- 2) Madrasah yang berciri khas agama islam terdiri dari madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah.
- 3) Madrasah keagamaan adalah madrasah pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengetahuan khusus keagamaan.⁵³

2. Pengertian Pondok Pesantren

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua, pesantren memiliki kontribusi dalam mewarnai perjalanan sejarah bangsa ini. Kontribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan semata, tetapi juga berkaitan dengan bidang-bidang yang

⁵³ Haidar Putra Dauli, *Historis dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001), hal. 61.

lain dalam skala luas. Pesantren telah melintasi waktu yang sangat panjang berikut pengalamannya yang bermacam-macam dan telah berpartisipasi memecahkan problem umat pada berbagai aspek kehidupan baik pendidikan, dakwah, politik, sosial-ekonomi maupun aspek lainnya seperti sosial-budaya, sosial-religius, pembangunan dan lain-lain. Namun, pesantren tetap menampakkan sebagai lembaga pendidikan hingga sekarang ini yang tumbuh subur di bumi Indonesia meskipun menghadapi gelombang modernisasi dan globalisasi yang tersebar di dunia.⁵⁴

Istilah pesantren bisa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi pondok pesantren. Secara esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat dipandang sebagai pembeda antara pondok dan pesantren.⁵⁵ Pesantren sesungguhnya berasal dari kata santri, yang mendapat awalan pe dan akhiran an sebagai tempat tinggal para santri menimba ilmu agama. Kata santri juga berarti orang yang mendalami pengetahuannya dalam bidang agama Islam. Sebagian penting dari pesantren, santri merupakan sekelompok orang yang memiliki ketekunan dalam mempelajari kajian kitab-kitab kuning (klasik) yang memuat berbagai

⁵⁴Moh Irsyad Fahmi R, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Menjawab Tantangan Modernitas*, Studi Multisitus di Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Al-Falah Kediri, dalam *dinamika penelitian media komunikasi penelitian social keagamaan* <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/dinamika/article/view/832/576> diakses pada Rabu 18 Februari 2020 pukul 19.24 WIB

⁵⁵Mujamil qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: erlangga, 2002), hal.1

ilmu agama seperti fiqih, tasawuf, tafsir, tauhid, hadits, dan sebagainya. Tidak heran apabila santri dianggap sebagai generasi terbaik dalam ilmu agama yang dapat diandalkan untuk melakukan perubahan social dalam kehidupan.⁵⁶ciri-ciri pesantren adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan sosok kiai. Faktor yang mendukung keakraban ini karena tinggal dalam satu lingkungan pondok.
2. Tawadu' santri terhadap kiai. Para santri menganggap bahwa menentang sang kiai selain dianggap tidak berakhlak baik atau tidak sopan juga bertentangan dengan ajaran agama islam.
3. Hidup hemat dan sederhana dilakukan dalam kehidupan pondok pesantren.
4. Hidup saling membantu dan menolong sesama amat terasa di pondok pesantren. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembiasaan diri seperti santri menyuci pakaiannya sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri dan mengurus segala hal sendiri atau mandiri.
5. Jiwa tolong menolong dan persaudaraan sangat mendominasi pergaulan di pesantren.
6. Disiplin sangat ditekankan dalam kehidupan dilingkungan pondok pesantren.

⁵⁶Mohammad takdir, *ModernisasiKkurikulum Pesantren*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal. 24-25

7. Berani menderita untuk mencapai sesuatu tujuan merupakan salah satu pendidikan yang diperoleh di pesantren.⁵⁷

Dari segi perkembangan masyarakat, maka pendidikan pesantren baik tempat, bentuk hingga substansinya telah jauh mengalami perubahan. Pesantren tidak lagi sederhana seperti apa yang digambarkan seseorang, akan tetapi pesantren dapat mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Ada beberapa pembagian pondok pesantren dan tipologinya:

- a) Pesantren salafi, pondok pesantren salafi yakni pondok pesantren yang melakukan pengajaran terhadap santri-santrinya untuk belajar agama islam secara khusus tanpa mengikutsertakan pendidikan umum di dalamnya. Kegiatan yang dilakukan biasanya mempelajari ilmu-ilmu agama dengan menggunakan kitab-kitab kuning atau kuno (klasik), menggunakan metode tradisional seperti hafalan, menerjemahkan kitab-kitab saat berlangsungnya proses belajar mengajar
- b) Pesantren khalafi, yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasikal (madrasah), memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta juga memberikan pendidikan ketrampilan. Sedangkan mengenai arti pesantren khalafiyah (modern) adalah pesantren yang mengadopsi sistem

⁵⁷Mustajab, *Masa Depan Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS. 2015), hal. 58

madrasah atau sekolah yang memasukkan pelajaran umum dan kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti: MI/SD, MTS/SMP, SMA/SMK.

- c) Pesantren semi modern, yaitu perpaduan antara pesantren salafi dan khalafi. Pesantren model ini bercirikan nilai-nilai tradisional yang masih kental dipegang teguh, kiai masih menempati posisi sentral, dan norma kode etik pesantren masih tetap menjadi standar pola pengembangan pesantren. Tetapi, pesantren juga mengadopsi sistem pendidikan modern relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan masa depan.⁵⁸

Adapun pelaksanaan kurikulum pesantren dalam pembelajaran dilakukan dengan metode bandongan, sorogan, dan hafalan. Metode bandongan merupakan metode pembelajaran dengan berpusat pada guru (guru yang aktif dan santri yang pasif) dimana para santri dengan duduk disekeliling guru (kiai) yang membaca kitab dan santri menyimak masingmasing kitab dan mencatat jika dipandang perlu. Metode sorogan adalah metode pembelajaran di mana santri menghadap guru secara satu persatu dengan membawa kitab yang dipelajari. Adapun metode pembelajaran dengan hafalan berlangsung

⁵⁸Hamdan Farchan & Syaifuddin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 2

dimana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajarinya.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis dengan judul “Manajemen Pengembangan Kurikulum Model Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor di Pondok Pesantren Darul Qurro Kawungaten Cilacap” pada tahun 2018 oleh Siti Toyibah dengan fokus pengembanagn kurikulum yang berdasarkan manajemen yang baik dan dapat disimpulkan tahap perencanaan (*Planning*), Pimpinan Pondok Pesantren mengadakan rapat bersama Direktur KMI Darul Qurro dan dewan guru untuk membahas pengembangan kurikulum. Tahap pengorganisasian (*Organizing*), Pimpinan Pondok Pesantren bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan yang menjadi tujuan lembaga dan membagi tugas kerja kepada para pendidik melalui bagian kurikulum dan pengajaran. Tahap pelaksanaan (*Actuating*), dilakukan melalui kegiatan pra instruksional, instruksional (inti/isi) dan tindak lanjut/evaluasi dengan berdasarkan pada kurikulum yang telah direncanakan, meliputi perangkat pembelajaran dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tingkat madrasah dan tingkat kelas. Terakhir, tahap evaluasi (*Controlling*), kegiatan evaluasi dan pengawasan di KMI Darul Qurro dilakukan oleh Pimpinan Pondok Pesantren dan

Direktur KMI Darul Qurro, melalui pengawasan langsung, inspeksi mendadak (sidak), dan pengarahan secara berkala, berkelanjutan, dan menyeluruh. Adapun kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh dewan guru melalui dua macam ujian yaitu ujian lisan dan ujian tulis.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang Saya lakukan adalah karena objeknya yang tidak sama, dalam penelitian saya membahas Manajemen kurikulum Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah dalam meningkatkan mutu madrasah di MA Al-Mawaddah 2 Blitar. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai Pengembangan Kurikulum Model Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor di Pondok Pesantren Darul Qurro Kawungaten Cilacap, sehingga penelitian ini dijadikan bahan rujukan yang relevan dalam penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai kurikulum.⁵⁹

2. Mohammad Kenang Slamet tahun 2015 dengan skripsi yang berjudul “Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren di MA Al Futuhiyyah 1 Mranggen Demak”. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitiannya adalah 1) Perencanaan kurikulum berbasis pesantren dilaksanakan setiap menjelang tahun ajaran baru (sekitar bulan juni). Perencanaan kurikulum melibatkan seluruh warga madrasah yang meliputi: kepala madrasah, wakil kepala bagian kurikulum, wakil kepala bidang sarana dan prasarana, wakil

⁵⁹Siti Toyibah, *Pengembangan Kurikulum Model Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor di Pondok Pesantren Darul Qurro Kawungaten Cilacap*, Skripsi (Purwokerto:Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2018) , hal. 196

kepala bagian kesiswaan, wakil kepala bagian hubungan masyarakat, koordinator BP, kepala TU, dan koordinator komite madrasah. 2) Pelaksanaan kurikulum berbasis pesantren di MA Futuhiyyah sangat didukung oleh kemampuan guru yang mengajar. Selain sebagian besar adalah alumni MA Futuhiyyah 1 juga merupakan ustadz atau bahkan Kyai di pesantren sehingga pembelajaran model pesantren begitu mudah dilaksanakan. Pelaksanaan kurikulum berbasis pesantren juga tampak adanya kitab-kitab salaf (kitab kuning) sebagai sumber belajar beserta metode pembelajaran pesantren seperti bandongan, halaqah, dan musyawarah. Sehingga dalam pelaksanaannya MA Futuhiyyah 1 benar-benar menerapkan pembelajaran layaknya di pesantren. 3) Pengawasan kurikulum berbasis pesantren di MA Futuhiyyah 1 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu dapat dilihat dari teknik-teknik supervisi yang digunakan, antara lain: kunjungan dan observasi kelas, pembicaraan individual, diskusi kelompok atau pertemuan kelompok, demonstrasi mengajar, dan perpustakaan profesional. Meskipun dari teknik pengawasan tersebut yang paling sering digunakan adalah diskusi kelompok. Adapun sasaran evaluasi kurikulum berbasis pesantren di MA Futuhiyyah 1 antara lain perangkat pembelajaran, buku referensi yang digunakan oleh guru, kitab-kitab rujukan, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 4) Evaluasi kurikulum

berbasis pesantren di MA Futuhiyya 1 dilaksanakan dengan menggunakan model CIPP (*context, input, process, dan product*).⁶⁰

Hal yang membedakan dengan penelitian peneliti pada fokus pembahasan dalam penelitian ini membahas perencanaan kurikulum kulliyatul muallimin al-islamiyah Gontor, pelaksanaan serta evaluasi. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang manajemen kurikulum berbasis pesantren. Tetapi karena sama-sama membahas tentang manajemen kurikulum sehingga penelitian ini di jadikan bahan rujukan yang relevan.

3. Skripsi dengan judul “Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Barito Kuala”, IAIN Antasari, 2012 Hj.ST. Mau‘izatul Hasanah, Banjarmasin. Bagaimana manajemen kurikulum pada PPS wajar dikdas di Kabupaten Barito Kuala? Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; khususnya pada PPS Al-Amin, Nururssalam dan Tarbiyatul Furqan, belum menggunakan prinsip-prinsip manajemen (baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun evaluasi) dalam tata kelola kurikulum; karena belum memiliki kurikulum secara tertulis, sehingga secara eksplisit belum ditetapkan tujuan pendidikan. Bagaimana usaha menata-kelola kurikulum pada PPS Wajar dikdas di

⁶⁰ Mohammad Kenang Slamet, “Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren (di MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak)” (Jurusan Ilmu Kependidikan Islam, Skripsi tidak diterbitkan, 2015), Dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/4546/1/103311016.pdf>, Diakses pada Senin 24 Januari 2020 Pukul 8.41 WIB

kabupaten Barito Kuala? Dengan keinginan kuat dan semangat memajukan sistem pendidikan kepesantrenan, maka kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; dari bentuk salafi masih dapat direkonstruksi menjadi kurikulum modern.⁶¹

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Saya adalah dalam penelitian ini kurikulum pesantren yang diterapkan tidak tertulis sedangkan dalam penelitian saya kurikulum pesantren itu tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diagendakan sehingga penerapan kurikulum itu memang dilaksanakan oleh seluruh warga ma'had dalam usaha meningkatkan mutu madrasah yang disesuaikan syari'at Islam dan merupakan pembiasaan yang baik jika diterapkan di Madrasah formal yang ada dibawah naungan pondok pesantren. Sehingga penelitian ini dijadikan bahan rujukan.

4. Soraya Agustin tahun 2017 dengan tesis yang berjudul "Manajemen Pengembangan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Studi Multikasus di SMK Negeri 1 Kota Kediri dan SMK Al Huda Kota Kediri". Hasil penelitiannya adalah 1) landasan dan prinsip pengembangan kurikulum 2013 di SMKN 1 dan SMK Al Huda. SMK Negeri dan SMK Al Huda memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan pada landasan-landasan filosofis pancasila, landasan psikologis,

⁶¹. ST.Mau'izatul Hasanah, *Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Barito Kuala*, Tesis, (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Islam IAIN Antasari, 2012), hal. 147

landasan sosiologis, landasan yuridis, landasan perkembangan IPTEK, dan landasan agama, dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Dalam landasan pengembangan kurikulum dilihat dari aspek agama SMK Al Huda lebih menekankan pendidikan karakter berbasis agama selain sisi kognitif, hal tersebut ditandai dengan program pembiasaan untuk sholat berjamaah. 2) tujuan pengembangan kurikulum 2013 di SMKN 1 dan SMK Al Huda. Perumusan tujuan pengembangan kurikulum di SMK Negeri 1 dan SMK Al Huda kota Kediri meliputi hubungan antara tujuan institusional (lembaga pendidikan) dan tujuan instruksional. 3) implementasi pengembangan kurikulum 2013 di SMKN 1 dan SMK Al Huda. Semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di sekolah (kepala sekolah) diarahkan untuk dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya (*customer*), terutama kepada pelanggan eksternal, seperti: siswa, orang tua atau masyarakat pemakai lulusan. Yang utama, keberhasilan sebuah sekolah SMK yaitu banyaknya lulusan yang diterima kerja, atau bekerja sesuai dengan bidangnya, karena SMK itu berbasis vokasi bukan edukasi beda dengan SMA atau MA yang memang berbasis edukasi. Lulusan SMK memang dipersiapkan untuk tenaga kerja menengah, jadi kalau lulusan SMK banyak yang kuliah, maka bisa dikatakan kurang berhasil pendidikan di sekolah tersebut.⁶²

⁶²Soraya Agustin, "Manajemen Pengembangan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah

Hal yang membedakan dengan penelitian saya, lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasinya di SMK Negeri 1 Kota Kediri dan SMK Al Huda Kota Kediri, sedangkan pada penelitian ini menggunakan lokasi penelitian di pondok pesantren putri al mawaddah 2 Blitar.

5. Puji Rahayu, Implementasi Kurikulum Pondok Pesantren dalam membentuk akhlak siswa di MAN Rejoso Peterongan Jombang, Skripsi, (Tulungagung: Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017). Hasil penelitian ini adalah (1) Struktur Kurikulum Pondok Pesantren di MAN Rejoso Peterongan Jombang adalah data mengenai mata pelajaran Kepondokkan dan Aplikasi Keagamaan serta alokasi waktu ditetapkan oleh madrasah, (2) Pelaksanaan Kurikulum PAI Kepesantrenan dalam membentuk akhlak siswa dilaksanakan oleh guru mata pelajaran diniyah dengan menggunakan modul yang diterbitkan oleh Pondok dan kitab klasik dengan menggunakan metode bandongan, sorogan pembiasaan dan keteladanan untuk evaluasinya menggunakan ujian tertulis dan praktek agar atsar dari pembelajaran dapat tetap selalu ada, (3) Aplikasi keagamaan yang diterapkan adalah Program yang bertujuan memberikan pembiasaan untuk mengamalkan syari'at Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah. Dengan adanya program keagamaan yang

tersebut maka hal tersebut termasuk usaha madrasah depan membentuk akhlak siswa, agar siswa terlatih dan akhirnya terbiasa melakukan hal-hal yang berguna dan mendatangkan pahala bagi yang melaksanakannya.⁶³

Hal yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah fokus penelitian lebih kepada manajemen kurikulum kulliyatul muallimin al-islamiyah Gontor dalam meningkatkan mutu madrasah di sebuah madrasah yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang PAI Kepesantrenan dalam membentuk akhlak siswa.

Seperti tabel dibawah ini

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Toyibah, Manajemen Pengembangan Kurikulum Model Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor di Pondok Pesantren Darul Qurro Kawungaten Cilacap, 2018.	Pengembangan kurikulum yang berdasarkan manajemen yang baik dan dapat disimpulkan tahap perencanaan (<i>Planning</i>), tahap pengorganisasian (<i>Organizing</i>), tahap pelaksanaan (<i>Actuating</i>), dan evaluasi (<i>Controlling</i>)	Menjelaskan manajemen kurikulum berkaitan dengan model Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Gontor	Objek yang diteliti, dan fokus penelitian pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dalam meningkatkan mutu madrasah.
2	Mohammad Kenang Slamet, Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren di Ma Al-Futuhiyyah 1	Proses perencanaan kurikulum berbasis pesantren, bentuk pelaksanaan kurikulum berbasis	Menjelaskan manajemen kurikulum yang ada di pesantren	Fokus penelitian pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

⁶³Puji Rahayu, Implementasi Kurikulum Pondok Pesantren dalam membentuk akhlak siswa di MAN Rejoso Peterongan Jombang dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5650/> di akses pada Kamis, 13 Februari 2020 pukul 15.34 WIB

	Mranggen Demak, 2015.	pesantren, model pengawasan kurikulum berbasis pesantren.		kurikulum dalam meningkatkan mutu madrasah.
3	Hj. ST. Mau'izatul Hasanah, Manajemen Kurikulum Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Barito Kuala, 2012.	Pondok pesantren salafiyah penyelenggara wajib belajar 9 tahun	Menjelaskan manajemen kurikulum yang ada di pesantren	Fokus penelitian dan kurikulum yang ada sudah tertulis.
4	Soraya Agustin, Manajemen Pengembangan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejurusan dalam Meningkatkan Mutu pendidikan Studi Multikasus di SMK Negeri 1 Kota Kediri dan SMK Al-huda Kota Kediri, 2017.	Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum 2013. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Implementas pengembangan kurikulum 2013.	Membahas tentang manajemen kurikulum	Lokasi penelitian di Pondok Pesantren Al-Mawaddah 2 Blitar.
5	Puji Rahayu, Implementasi Kurikulum Pondok Pesantren Dalam Membentuk Akhlak Siswa di MAN Rejoso Peterongan Jombang, 2017.	Struktur kurikulum pondok pesantren adalah mengenai data mata pelajaran dan aplikasi keagamaan serta alokasi waktu, pelaksanaan kurikulum PAI kepesantrenan dalam membentuk akhlak siswa dilaksanakan oleh guru diniyah dengan menggunakan metode klasik, aplikasi keagamaan yang diterapkan	Membahas tentang manajemen kurikulum pondok pesantren	fokus penelitian lebih kepada manajemen kurikulum kulliyatul muallimin al-islamiyah Gontor dalam meningkatkan mutu madrasah di sebuah madrasah yang berada dibawah naungan Pondok Pesantren

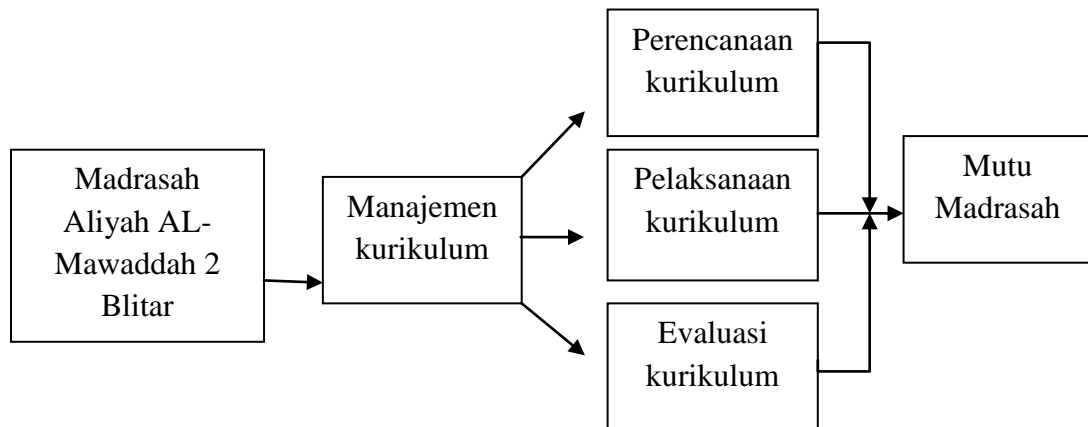
		adalah program pembiasaan untuk mengamalkan syari'at Islam.		
--	--	---	--	--

Peneliti menginginkan dari beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebuah acuan dan referensi di penelitian ini.

F. Paradigma Penelitian

Dalam suatu penelitian, setiap peneliti menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Adapun maksud dari paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofi utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia (bukan agama) yang memandu manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu. Dalam penelitian melihat paradigma yang berorientasi pada proses dinamis yang tidak terkait perlakuan tunggal yang ketat, tetapi lebih fokus pada realitas yang terjadi.⁶⁴ Setelah melihat apa yang sudah peneliti sampaikan diatas dapat digambarkan bahwa manajemen kurikulum madrasah sangat tidak lepas seluruh komponen-komponen yang ada terkait dengan kurikulum. Di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum nantinya pun sangat diperhatikan, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat berhasil sesuai harapan lembaga pendidikan dan masyarakat.

⁶⁴M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 13-14



Dalam bagan diatas dapat dipahami bahwa madrasah atau pondok pesantren dalam melakukan manajemen kegiatan kurikulum dalam meningkatkan mutu madrasah. Dan manajemen kurikulum madrasah tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen kurikulum yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Perencanaan kurikulum yang membahas tentang fungsi perencanaan kurikulum, prinsip-prinsip perencanaan kurikulum, serta karakteristik perencanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum yang masih berbentuk tulisan menjadi kegiatan yang nyata dan benar dilakukan. Pelaksanaan kurikulum banyak membahas tentang model dan tahap-tahap pelaksanaan kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum selanjutnya adalah evaluasi kurikulum yang membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi kurikulum serta tujuan evaluasi kurikulum.